BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Proses penyelesaian sengketa kuil *Preah Vihear* antara Thailand dan Kamboja di Mahkamah Internasional dimulai dengan disepakatinya perjanjian khusus (*special agreement*). Setelah perjanjian khusus dilanjutkan dengan tahap:
 - Pengajuan permohonan penafsiran (*Application*) yang dilakukan oleh Kamboja melalui permohonan 28 April 2011 daftar umum nomor 151,
 - Keputusan Sementara (*Provisional Measure*) yang memutuskan kedua negara untuk melakukan gencatan senjata,
 - Pembelaan tertulis (*Written Pleading*) yang disampaikan oleh masing-masing pihak antara lain mengenai perbedaan pendapat atas makna dan ruang lingkup dari putusan tahun 1962,
 - Pembelaan Lisan (*Oral Pleading*) dalam bentuk presentasi dimana Mahkamah mendengarkan argumen dari masing-masing perwakilan mengenai klaim yang diyakini berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki para pihak,
 - Putusan (*Judgement*) 11 November 2013 daftar umum nomor 151 dengan hasil penafsiran yang secara bulat menyatakan, Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi berdasarkan pasal 60 Statuta

Mahkamah Internasional untuk menerima permohonan penafsiran. Hasil dari penafsiran keputusan 1962 menyatakan bahwa keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat, istilah daerah sekitar kuil dan areal kuil memiliki arti yang sama sehingga daerah sekitar kuil merupakan kedaulatan Kamboja, sebagai konsekuensi Thailand wajib menarik pasukan dari wilayah kedaulatan Kamboja.

- 2) Dasar hukum Mahkamah Internasional dalam proses penyelesaian sengketa antara lain Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa, Statuta Mahkamah Internasional, Aturan Mahkamah Internasional 1978, Aturan Praktek. Dasar hukum Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa Kuil *Preah Vihear* antara lain, bukti- bukti perjanjian terdahulu antara pendahulu kedua negara yaitu Perancis dan kerajaan Siam, prinsip hukum umum seperti prinsip *Estoppel*, bukti-bukti pendukung seperti peta *Annex I* dan perjanjian khusus (*special agreement*) yang disepakati, argumen-argumen baik lisan maupun tertulis dari kedua pihak dalam persidangan, serta keputusan 15 Juni 1962 yang kembali ditegaskan melalui penafsiran keputusan Mahkamah Internasional 11 November 2013. Berdasarkan data dan fakta yang tertuang di dalam dokumen-dokumen dan bukti- bukti sebagai dasar Mahkamah Internasional dalam memutuskan penafsiran terhadap kepemilikan areal sekitar Kuil *Preah Vihear* pada keputusan 1962 maka sudah jelas dinyatakan bahwa baik kuil maupun wilayah sekitar kuil merupakan kedaulatan Kamboja berdasarkan garis batas wilayah di areal sekitar Kuil *Preah Vihear*. Sehingga, Mahkamah Internasional akhirnya mencatat bahwa, dalam proses ini,

Thailand telah menerima bahwa ia memiliki kewajiban hukum umum dan harus menghormati integritas wilayah Kamboja, yang berlaku untuk setiap wilayah sengketa yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional berada di bawah kedaulatan Kamboja

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penjelasan yang diperoleh, adapun rekomendasi yang dapat saya sampaikan adalah:

- 1) Dalam penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional maka diharapkan proses yang dilalui dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam segi waktu dan Mahkamah Internasional memberikan jangka waktu yang lebih singkat dalam proses persidangan, mengingat tahapan dan proses yang dilalui dalam kasus sengketa *Kuil Preah Vihear* antara Thailand dan Kamboja memakan waktu hampir 3 tahun, sehingga apabila jangka waktu yang diberikan lebih singkat maka penyelesaian melalui Mahkamah dapat menjadi pilihan utama.
- 2) Mahkamah Internasional dalam memutuskan perkara *Kuil Preah Vihear* antara Thailand dan Kamboja dapat mempertimbangkan seluruh dasar hukum lainnya yang merupakan sumber hukum Internasional seperti doktrin para ahli hukum internasional yang belum dijadikan dasar pertimbangan Mahkamah Internasional dalam memutus sengketa *Kuil Preah Vihear*. Sehingga secara keseluruhan, dasar hukum internasional menurut pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional dijadikan sebagai dasar pertimbangan Mahkamah Internasional dalam memutus suatu perkara.